

## DINAMIKA KEHIDUPAN NELAYAN PANGANDARAN (1950-1970 AN)

Dahimatul Afidah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
e-mail penulis: Dahimatul.fuah@uinkhas.ac.id

Naskah diterima: 17/11/2022, Naskah direvisi: 18/11/2022, Naskah disetujui: 22/11/2022

### ABSTRACT

*Pangandaran is one of the areas where the community's economy relies on the maritime sector. The life dynamics of Pangandaran fishermen from 1950 to 1970 showed an important change. These changes include changes in the use of equipment for sailing to changes in economic characteristics. From 1950 to the end of 1960, the Pangandaran community still used traditional equipment for sailing. Changes occurred in 1970 when the government began to introduce a more modern shipping system using engines. In addition to shipping techniques, major changes also occurred which also began in the 1970s when Pangandaran was opened to become a tourist attraction open to the public. This change can be seen from the change in the economic mindset of the people who used to be "farmer fishermen" then turned into "trade fishermen". This study uses historical research methods consisting of heuristics, verification, interpretation and historiography. This study tries to combine two main sources, namely archival sources and oral sources where the research data sources are obtained from interviews with historical actors. The results of this study are expected to enrich the sources of maritime history studies which are still quite limited.*

*Keyword: history, maritime, pangandaran*

### ABSTRAK

Pangandaran merupakan salah satu daerah yang perekonomiannya masyarakatnya bertumpu pada sektor maritim. Dinamika kehidupan nelayan Pangandaran dari tahun 1950 hingga 1970 menunjukkan sebuah perubahan penting. Perubahan tersebut meliputi perubahan penggunaan peralatan untuk berlayar hingga perubahan karakteristik ekonomi. Pada tahun 1950 hingga akhir 1960, Masyarakat Pangandaran masih menggunakan peralatan tradisional untuk berlayar. Perubahan terjadi di tahun 1970 ketika pemerintah mulai mengenalkan sistem pelayaran yang lebih modern dengan menggunakan mesin. Selain dalam teknis pelayaran, perubahan besar juga terjadi yang juga dimulai awal tahun 1970 ketika Pangandaran dibuka menjadi sebuah obyek wisata yang terbuka untuk umum. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan pola pikir ekonomi masyarakat yang dulu menjadi "nelayan tani" kemudian berubah menjadi "nelayan dagang". Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini berusaha memadukan dua sumber utama yaitu sumber arsip dan sumber lisan dimana sumber data penelitian tersebut diperoleh dari wawancara dengan pelaku sejarah. Hasil penelitian ini

diharapkan bisa memperkaya sumber kajian sejarah maritim yang hingga saat ini masih cukup terbatas.

**Kata kunci:** Sejarah, Maritim, Pangandaran

## PENDAHULUAN

Program dari pemerintahan Presiden Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya yang terfokus pada sektor maritim membuat sejumlah penelitian sejarah maritim semakin menggelora. Jika diamati lebih jauh, program dari pemerintah tersebut tampaknya dipengaruhi oleh kesadaran sejarah para petinggi negara bahwa nenek moyang kita adalah “pelaut”. Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan berasal dari munculnya istilah *Archipelago*, dimana *Arc* berarti besar dan utama sedangkan *pelagos* berarti laut. Dengan demikian *Archipelago state* memiliki arti “negara laut utama”. Sebuah negara laut yang ditaburi pulau-pulau, bukan pulau-pulau yang dikelilingi laut.<sup>1</sup> Wilayah Indonesia yang disebut sebagai Negara kepulauan, atau laut yang ditaburi pulau seperti yang disampaikan oleh AB Lopian lebih tepat dalam pengertian secara fisik saja. Kesadaran penduduk Indonesia dalam memaknai lingkungan fisiknya yang memiliki laut jauh lebih luas daripada daratannya masih sangat lemah. Entah karena pengaruh oleh kolonialisme Belanda yang hanya terfokus pada sektor darat, khususnya sektor pertanian dan perkebunan telah membentuk mental “darat” masyarakat Indonesia.

Pandangan terhadap konsep *Archipelago* yang telah dilekatkan dengan kondisi Indonesia hingga saat ini juga masih banyak menyisakan bukti nyata. Beberapa wilayah di Indonesia yang masih bergantung pada sektor laut khususnya dalam sektor perikanan banyak ditemui hingga saat ini. Kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir yang masih eksis untuk memanfaatkan laut menjadi bukti nyata bahwa sektor maritim Indonesia masih terus dalam proses perkembangan. Tidak terkecuali di Kabupaten Pangandaran.

Pangandaran merupakan sebuah kabupaten baru yang terbentuk pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2012.<sup>2</sup> Pembentukan Kabupaten Pangandaran merupakan dampak dari perkembangan pariwisata yang memiliki pengaruh besar terhadap pundi-pundi penghasilan daerah. Pemekaran ini juga merupakan keinginan yang murni dari warga Pangandaran. Sebelumnya, Pangandaran merupakan sebuah kecamatan yang berada dibawah kabupaten Ciamis. Letak wilayah yang terpisah jauh juga menjadi pemicu pemekaran Kabupaten Pangandaran.

Posisi Pangandaran sebagai wilayah pesisir yang terkenal dengan hasil tangkapan ikannya dan pariwisatanya semakin hari semakin meningkat. Apalagi dengan diangkatnya Menteri Perikanan dan Kelautan baru, Ibu Susi juga memiliki pengaruh besar terhadap berkembangnya daerah Pangandaran. Dukungan pemerintah terhadap pembangunan kabupaten Pangandaran menjadi lebih terlihat setelah dilantiknya Menteri Perikanan dan Kelautan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kabupaten Pangandaran adalah dibangunnya beberapa penunjang sarana dan prasarana pariwisata, diantaranya hotel, monument perahu vinici, pembangunan jalan dan sebagainya.

Perjalanan sejarah nelayan di Pangandaran dari masa orde lama hingga orde baru mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Adanya kemajuan teknologi dalam bidang perkapalan berpengaruh secara signifikan terhadap pemasukan para nelayan. Selain itu, berbagai kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pada

---

<sup>1</sup>Adrian B. Lopian, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), 1-2.

<sup>2</sup> “Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2012” tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

masa orde lama dan orde baru yang meliputi penertiban pemasaran ikan juga berpengaruh terhadap penghasilan para nelayan. Tidak hanya itu, peresmian Pangandaran sebagai daerah pariwisata juga membawa pengaruh signifikan terhadap jumlah nelayan di Pangandaran.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Penelitian sejarah merupakan penelitian masa lalu yang mengedepankan sumber primer sebagai tolok ukur obyektivitas tulisan. Untuk mencapai obyektivitas memang bukan hal yang mudah, sehingga disini peneliti berusaha memadukan berbagai sumber mulai dari sumber primer yang terdiri dari sumber sejarah lisan, arsip dan beberapa data statistik. Namun, karena keterbatasan sumber arsip yang diperoleh oleh peneliti, sumber lisan menjadi sumber utama penelitian ini. Dalam metode penelitian sejarah lisan, proses penelusuran sumber didasarkan pada wawancara mendalam dari pelaku ataupun saksi sejarah yang berkaitan langsung dengan peristiwa sejarah. Melalui pendekatan ini, penelitian sejarah tidak mudah dimodifikasi oleh para penguasa. Namun kesulitan dalam metode penelitian lisan ini adalah terbatasnya narasumber yang masih ada apabila periode penelitian terlalu tua. Selain itu kesulitan sejarawan yang kemungkinan akan dihadapi adalah memori yang terlalu subyektif dari masing-masing narasumber. Seringkali tidak hanya subyektif, para narasumber yang ada di lapangan juga memiliki ingatan yang agak kacau. Faktor umur yang menjadi alasan utamanya. Oleh karena itu dalam penelitian sejarah lisan dibutuhkan skill dan metode-metode tertentu dari para sejarawan untuk mendapatkan sumber yang benar-benar akurat. Sejarawan haruslah berhati-hati dalam menginterpretasikan sumber lisan yang diperoleh secara langsung dari narasumber.<sup>3</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Kondisi Nelayan Pangandaran sebelum mengenal mesin perkapalan**

Pantai Selatan Jawa hingga saat ini masih banyak dimaknai dalam sisi mistis daripada sisi ekonominya. Keadaan topografi pantai selatan yang jauh berbeda dengan pantai utara menjadi alasan utamanya. Di wilayah Jawa Barat sendiri kondisi kedalaman dan gelombang laut antara pantai selatan dengan pantai utara relatif sangat berbeda. Laut Jawa memiliki kedalaman kurang dari 200 meter sedangkan Samudra Hindia memiliki kedalaman lebih 5000 meter. Dengan perbandingan kedalaman laut yang sangat signifikan tersebut menyebabkan Wilayah Selatan Pulau Jawa memiliki gelombang yang sangat tinggi. Selain memiliki gelombang yang tinggi di wilayah laut selatan juga memiliki intensitas gelombang yang cukup padat, dimana jumlah gelombang setiap detik di Samudera Hindia lebih banyak bila dibandingkan dengan Laut Jawa.<sup>4</sup>

Sebagai salah satu wilayah Jawa Barat yang berada di pantai Selatan, Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu daerah yang tetap bercorak maritim

---

<sup>3</sup> Paul Thomson, *Suara dari Masa Silam* (Yogyakarta: Ombak, 2012).

<sup>4</sup> Ira Adriati, *Perahu Sunda: Kajian Hiasan pada Perahu Nelayan di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2004).

meskipun dengan kondisi laut yang berom besar. Wilayah Pangandaran pada masa kolonial sendiri diperkirakan masuk kedalam wilayah Priangan Timur.<sup>5</sup> Kabupaten Pangandaran banyak dihuni oleh para nelayan yang berasal dari wilayah Jawa Barat yang bersuku Sunda. Kondisi pantai selatan yang identik dengan ombak besar yang sering dikaitkan dengan aroma mistik tampak tidak berlaku di Pangandaran. Adapun kepercayaan terhadap hal-hal mistik masih berlaku namun tidak membuat masyarakat disana menghindari aktivitas pelayaran.

Penyebutan istilah Pangandaran sebenarnya berasal dari kata *andar-andar* yang berarti pendatang. Berdasarkan keterangan lisan, Pangandaran merupakan daerah yang didiami oleh masyarakat pendatang yang diperkirakan datang pada tahun 1950-an dengan tujuan untuk mencari penghidupan ekonomi di wilayah ini. Dalam kata lain para *andar-andar* yang datang ke Pangandaran adalah dalam rangka untuk mencari *pangan*. Namun berdasarkan keterangan lain Pangandaran berasal dari kata *pangan* dan *dahar* yang berarti tempat untuk mencari makan. Para pendatang yang menetap di wilayah Pangandaran tersebut mayoritas adalah berasal dari suku Sunda. Oleh karena itu hingga saat ini, penduduk dari wilayah Pangandaran didominasi oleh para nelayan Sunda.<sup>6</sup>

Nelayan Pangandaran pada kurun waktu 1950 an merupakan nelayan tradisional yang sangat tergantung dengan keadaan alam. Arah angin menjadi penentu utama bagi keberlangsungan penangkapan ikan. Jika arah angin atau keadaan cuaca tidak memungkinkan untuk dilakukan pelayaran, maka nelayan tidak berlayar. Keadaan pantai selatan Jawa yang jauh berbeda dengan keadaan di pantai utara berpengaruh besar terhadap besar-kecilnya hasil tangkapan ikan para nelayan. Kondisi laut lepas dengan ombak yang sangat tinggi juga berpengaruh terhadap sedikitnya jumlah penduduk Indonesia di daerah pesisir selatan yang melakukan penangkapan ikan. Namun berbeda dengan wilayah lain, Pangandaran justru menjadi salah satu daerah penghasil ikan yang cukup besar di Indonesia meskipun juga terletak di laut selatan.<sup>7</sup>

Kondisi geografis Pangandaran yang memiliki tanah menjorok ke laut menyebabkan Pangandaran memiliki daerah pantai dengan ombak yang relatif kecil jika dibandingkan dengan wilayah pantai di pesisir selatan lain. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir untuk bekerja sebagai nelayan. Nelayan yang ada di wilayah Pangandaran sebelum adanya mesin penangkapan ikan masih menggunakan alat-alat tradisional. Para nelayan menggunakan dayung dan perahu kecil untuk menangkap ikan di laut. Mereka sangat mengandalkan tenaga otot dalam melakukan pelayaran. Perahu yang mereka gunakan juga masih sederhana. Perahu-perahu yang digunakan oleh nelayan tersebut terbuat dari kayu yang diproduksi oleh masyarakat setempat. Jenis perahu yang digunakan oleh nelayan di pantai selatan terdapat delapan bentuk, yaitu Congkreg, Payang, Gillnet, Perahu Resin Pelabuhan Ratu, Bagang, Bleketek, Diesel dan Jukung Pangandaran (lihat gambar 1). Secara kuantitas, masyarakat Pangandaran banyak menggunakan perahu jukung dengan dilengkapi layar. Oleh karena itu, mereka tidak bisa

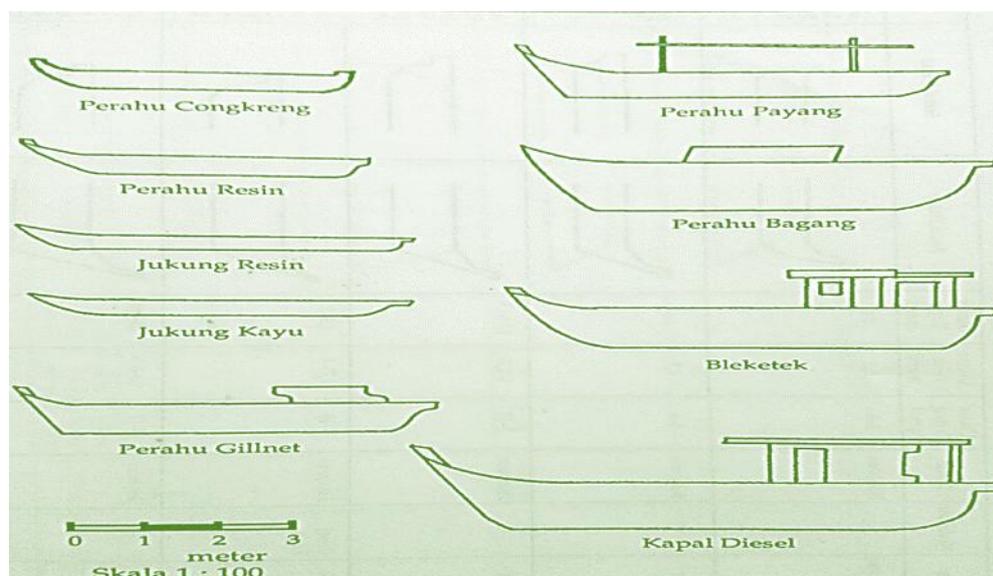
---

<sup>5</sup> Masyuri, *Menyisir Pantai Utara Jawa: Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940* (Jakarta: Yayasan Pustaka Utama, 1995).

<sup>6</sup> Idat Abdulwahid, Mien Rukmini, dan Muhammad Fanani, *Kodifikasi Cerita Rakyat daerah Wisata Pangandaran, Jawa Barat* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998).

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Enas, 84 tahun, di Pangandaran, 9 April 2017.

melakukan perjalanan yang jauh. Rute paling jauh yang bisa ditempuh hanya sampai ke daerah Cilacap dan Nusa Kambangan.<sup>8</sup>



Gambar 1

Bentuk Perahu di Pantai Selatan

Sumber : Ira Adriati, *Perahu Sunda: Kajian Hiasan Pada Perahu Nelayan di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa* (Bandung : Kiblat Buku Utama, 2004)

Kegiatan perikanan di Pangandaran selama tahun 1960-an kurang berkembang baik karena tidak adanya PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan). Di daerah pantai selatan Jawa Barat sendiri, kegiatan perikanan juga bisa dikatakan masih baru. Kegiatan perikanan di Pelabuhan Ratu dimulai tahun 1960-an. Namun disisi lain jika dilihat dari keterangan sumber lisan nelayan di Pangandaran, antara tahun 1950 sampai 1960-an di Pangandaran juga sudah mulai ada aktivitas pelayaran. Namun memang aktivitas ini terlihat masih tergantung dengan Cilacap sebagai pusat pasar. Para nelayan di Pangandaran biasanya banyak membeli garam dari Cilacap yang digunakan untuk mengawetkan ikan. Jenis perahu yang digunakan oleh masyarakat Pangandaran juga banyak mengadopsi jenis perahu jukung yang ada di Cilacap.<sup>9</sup> Nelayan di Pangandaran terdiri dari berbagai lapisan sosial. Sebagaimana dengan masyarakat di wilayah lain, status ekonomi masyarakat di Pangandaran juga beranekaragam. Sumber dari perbedaan status ekonomi tersebut adalah bersumber pada laut. Tidak semua para nelayan di Pangandaran memiliki perahu sendiri. Para nelayan yang memiliki perahu sendiri memiliki penghasilan yang tinggi, sedangkan para nelayan yang tidak memiliki perahu sendiri bekerja kepada pemilik perahu sebagai buruh. Satu perahu kecil biasanya terdiri dari dua orang nelayan. Dua orang yang ada dalam kapal tersebut biasanya terdiri dari para buruh ataupun pemilik kapal dan buruh. Sebagai upahnya, buruh nelayan tersebut mendapatkan upah 10% dari hasil tangkapan ikan.<sup>10</sup>

Dalam melakukan penangkapan ikan, para nelayan Pangandaran menghabiskan waktu sekitar satu minggu di laut. Biasanya mereka menghabiskan

<sup>8</sup> *Ibid.*; Adriati, *op. cit.*

<sup>9</sup> *op. cit.*, n.d.

<sup>10</sup> *Ibid.*

waktu dilaut untuk mencari ikan dan beristirahat sejenak di pulau Nusa Kambangan. Para nelayan meletakkan jala di tengah laut kemudian di ambil pada esok harinya. Selama menunggu hasil dari jala yang mereka pasang, para nelayan biasanya beristirahat di pulau Nusa Kambangan dan mengawetkan ikan hasil tangkapan sebelumnya. Para nelayan menggunakan garam untuk mengawetkan ikan tangkapannya. Mereka menjual ikannya dengan bentuk ikan asin. Mereka sangat jarang menjual ikan segar karena takut busuk selama di perjalanan. Kalaupun mereka menjual ikan segar, berarti mereka mendapat ikan selama diperjalanan pulang.<sup>11</sup>

Ukuran ikan yang didapat dari nelayan pantai selatan memiliki ukuran yang sangat besar. Kondisi laut lepas memungkinkan munculnya varietas ikan dengan ukuran yang sangat besar. Dengan peralatan seadanya, nelayan di Pangandaran bisa menangkap ikan dengan ukuran 50 kg hingga 1 kwintal. Keberanian para nelayan Pangandaran lebih besar dibandingkan dengan nelayan yang ada di pesisir selatan lain. Kondisi seperti ini juga di dukung oleh perbedaan kepercayaan antara nelayan sunda dan nelayan Jawa. Berbeda dengan di wilayah Jawa, mitos-mitos tentang hantu laut atau penguasa laut membuat masyarakat Jawa takut melakukan pelayaran.<sup>12</sup>

### **Nelayan Pangandaran setelah mengenal mesin perkapalan**

Peralihan dari sistem penangkapan ikan secara tradisional menjadi modern ditandai dengan berkembangnya penggunaan mesin diesel untuk menggerakkan perahu. Masuknya teknologi mesin perahu di Pangandaran berdasarkan memori kolektif masyarakat diperkirakan awal tahun 1970-an. Keberadaan mesin perkapalan yang membantu penangkapan ikan di Pangandaran memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi nelayan. Penghasilan para nelayan mengalami peningkatan yang sangat signifikan.<sup>13</sup>

Mesin perahu yang digunakan para nelayan menggantikan alat tradisional masyarakat yang dulunya mengayuh dayung dan layar menjadi lebih praktis. Para nelayan tidak lagi mengandalkan tenaga otot ataupun angin dalam melakukan pencarian ikan di laut. Hanya cukup dengan membeli bahan bakar, mereka bisa menjalankan perahu mereka. Selain itu, pencarian ikan juga menjadi lebih cepat. Mereka tidak lagi membutuhkan waktu berhari-hari untuk menunggu arah angin ataupun mengumpulkan tenaga untuk mengayuh perahu mereka.<sup>14</sup> Para nelayan menggunakan perahu dengan jenis jukung kayu. Perahu tersebut dilengkapi oleh mesin sebagai penggerak dan menggunakan cadik pada kedua sisi perahu. (lihat gambar 2)

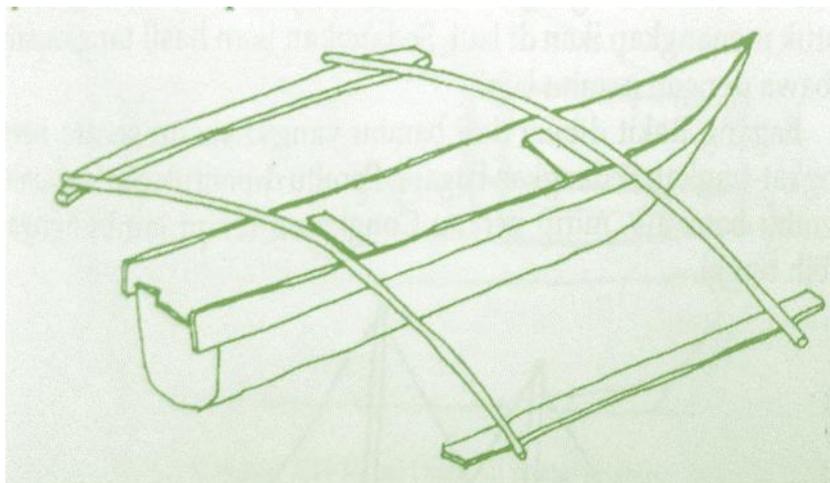
---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Saminah, 70 tahun, di Pangandaran, 10 April 2017.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Usup Darso, 73 Tahun, Nelayan dan Pedagang, 9 April 2017.



Gambar 2

Perahu Jukung Pangandaran

Sumber :Ira Adriati, *Perahu Sunda: Kajian Hiasan Pada Perahu Nelayan di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa* (Bandung : Kiblat Buku Utama, 2004)

Kondisi pelayaran di Pangandaran berubah semenjak adanya mesin. Para nelayan bisa melakukan pencarian ikan dengan rute yang lebih jauh. Dengan adanya rute yang jauh maka penghasilan masyarakat meningkat pesat. Jika sebelumnya pelayaran hanya dilakukan dengan melihat keadaan cuaca, maka dengan penggunaan mesin kapal para nelayan tidak lagi tergantung pada cuaca. Para nelayan bisa mencari ikan setiap hari. Mereka tidak perlu menghabiskan waktu berhari-hari dilaut untuk menunggu jala dan menunggu arah angin. Oleh karena itu, keberadaan mesin perkapalan mampu meningkatkan penghasilan masyarakat nelayan di Pangandaran.<sup>15</sup>

### **Pangandaran sebagai daerah pariwisata**

Pembukaan pariwisata Pangandaran merupakan sebuah jalan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sektor pariwisata di Pangandaran ini menandai beralihnya profesi masyarakat yang bermatapencarian nelayan, dimana sebelumnya mereka berprofesi sebagai nelayan sekaligus petani menjadi nelayan sekaligus pedagang. Perubahan sistem matapencarian tersebut sering dikenal dengan istilah “nelayan tani” dan “nelayan dagang”. Sebelum dibukanya sektor wisata di Pangandaran, biasanya di sela-sela aktivitas berlaut, para nelayan juga bertani. Apabila cuaca tidak memungkinkan untuk berlaut, maka para nelayan biasanya menggarap sawah mereka atau bekerja pada pemilik sawah. Namun semenjak dibukanya wilayah Pangandaran sebagai tempat pariwisata, banyak yang nelayan beralih profesi sebagai pedagang. Terbukanya kesempatan baru bagi nelayan untuk melayani turis lokal maupun mancanegara memunculkan beberapa peluang bisnis yang terdiri dari penginapan, aksesoris, dan makanan.<sup>16</sup>

Wacana untuk menjadikan Pangandaran sebagai wilayah pariwisata sudah ada semenjak tahun 1972. Sebelum Pangandaran menjadi Kabupaten yang berdiri sendiri, Pangandaran merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Ciamis. Sektor pariwisata memang telah lama mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah Ciamis. Pemerintah daerah melihat bahwa sektor pariwisata memiliki peran

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ciamis mengeluarkan Peraturan Daerah No. 23/PD-DPRD/1972 tentang pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Kebijakan tersebut kemudian mendapat revisi beberapa kali hingga pada tahun 1976 Pemda Ciamis meresmikan pembukaan pariwisata di wilayah Ciamis, termasuk salah satunya Pangandaran dan menentukan besarnya biaya pemungutan bagi para wisatawan untuk berkunjung di lokasi pariwisata.<sup>17</sup>

Dalam usaha menertibkan daerah pariwisata di Pangandaran, pada tahun 1982 pemerintah Kabupaten Ciamis membuat kebijakan mengenai penertiban wilayah pariwisata di Pangandaran. Sesuai dengan ketentuan No. 15/Hk.003/SK/1983 pemerintah mulai menertibkan objek wisata Pananjung Pangandaran dengan cara merapikan kios-kios yang ada disekitar pantai.<sup>18</sup> Keberadaan kios-kios yang terletak dipinggir pantai Pangandaran ini kemudian mendukung tumbuhnya perdagangan pernak-pernik yang sangat membantu perekonomian masyarakat. Selain itu, kios-kios yang ada dipinggiran pantai juga menyediakan ikan-ikan kering hasil tangkapan petani untuk dijual langsung kepada wisatawan.<sup>19</sup>

Munculnya bisnis baru di Pangandaran yang disebabkan oleh pembukaan pariwisata berpengaruh terhadap penurunan jumlah nelayan. Beberapa daerah wisata yang dibuka untuk umum sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai tempat untuk bersandar kapal-kapal. Pantai disekitar digunakan untuk aktivitas lain yaitu surfing, diving dan berenang. Selain itu, tempat-tempat disekitar pantai juga dipenuhi oleh para penjual makanan dan aksesoris. Dengan berubahnya kondisi pantai tersebut, kuantitas nelayan di Pangandaran menurun setiap tahun.<sup>20</sup>

Perubahan yang cukup besar akhirnya tidak bisa dihindarkan oleh masyarakat Pangandaran. Pembukaan Pangandaran sebagai daerah pariwisata pada tahun 1972 memicu peralihan mata pencaharian masyarakat nelayan, dari yang semula berprofesi sebagai nelayan sekaligus petani atau pekebun kemudian menjadi nelayan sekaligus sebagaipedagang.<sup>21</sup> Banyak masyarakat nelayan yang kemudian menjual sawahnya kepada para pengusaha ataupun penduduk sekitar untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Sehingga mayoritas nelayan yang ada di Pangandaran tidak lagi memiliki sawah.<sup>22</sup>

### **Kebijakan Pemerintah Dalam Sektor Maritim: Pembentukan Brigadir Nelayan**

Perhatian terhadap pentingnya dunia maritim sebagai sektor ekonomi yang menjanjikan sudah menjadi perhatian Sukarno sejak tahun 1960-an. Pada 3 September 1966, Pemerintah membuat kebijakan tentang Proyek Penelitian dan Pengembangan industri maritim. Yang dimaksud perindustrian maritim tersebut adalah perindustrian yang bergerak dalam bidang pembuatan kapal dan semua

---

<sup>17</sup>Fransisca Mulyono, "Pengaruh Kebijakan Inkremental terhadap Pengembangan Kepariwisata di Pangandaran" (Universitas Indonesia, 1994), 65.

<sup>18</sup>Mulyono, *op. cit.*

<sup>19</sup>"Wawancara dengan Ibu Atik Sarti, 44 tahun, pada tanggal 10 April 2017, di Pangandaran," n.d.

<sup>20</sup> *op. cit.*, n.d. Enas, *Op.cit.*,

<sup>21</sup> Nelayan dagang adalah nelayan yang memiliki profesi sampingan berdagang. Biasanya para nelayan tersebut berjualan di sekitar lokasi pariwisata.

<sup>22</sup>*op. cit.*, n.d.

alat-alat terapung, pembuatan dan perbaikan alat-alat penggerak kapal, serta alat-alat yang mendukung untuk perkapalan.<sup>23</sup> Dalam mensukseskan tujuan tersebut, pemerintah membentuk sebuah tim Perencanaan Proyek Pembangunan Industri Angkatan Laut serta mempersiapkan langkah-langkah untuk mengkoordinasikan antara Angkatan Laut dengan masyarakat.<sup>24</sup>

Pembentukan Brigade Nelayan Maritim I sesuai dengan Komando Presiden / Pangti ABRI / Pemimpin besar revolusi untuk mengarahkan dan mengikutsertakan seluruh kekuatan nasional sesuai dengan jiwa dan tahapan revolusi guna mensukseskan konfrontasi terhadap Malaysia dan memupuk serta memperkuat ketahanan revolusi dalam usaha mencapai tujuan revolusi. Dalam menjaga pertahanan negara khususnya di wilayah lautan serta hubungan konfrontasi, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Sukarno memfokuskan penjagaan yang ketat dalam wilayah geografis laut yang berbatasan dengan negara lain. Dalam mensukseskan misi tersebut, maka warga bahari atau maritim Indonesia sebagai barisan terdepan menjadi penjaga pintu gerbang benteng tanah air. Untuk memperkuat pertahanan di wilayah laut, maka pemerintah mengikutsertakan kaum nelayan sebagai unsur bahari dalam peningkatan penggalangan semua kekuatan bahari yang progresif revolusioner. Brigade Nelayan Maritim I (Aceh, Sumut, Sumbar), adalah para nelayan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan (rohani dan jasmani yang secara sukarela menyatakan bersedia membaktikan dirinya untuk pelaksanaan tujuan yang dimaksud keputusan pemerintah tersebut baik bersifat militer (bantuan tempur) dan non militer.<sup>25</sup>

Tidak hanya di wilayah perbatasan saja, pembentukan Brigade maritim juga diterapkan di beberapa wilayah maritime lainnya. Sebagai salah satu contohnya adalah di Pangandaran. Di Pangandaran sendiri, pembentukan Brigade Nelayan juga dilakukan secara sukarela oleh warga nelayan. Biasanya para nelayan yang bertugas sebagai Brignel menggunakan waktu disela-sela istirahatnya untuk berlayar. Mereka memiliki jadwal tertentu dalam bertugas sebagai Brignel. Para nelayan tersebut bergantian untuk bertugas sebagai Brignel.<sup>26</sup>

Dalam usaha membangun industri maritim, pemerintah Orde lama juga membentuk sebuah badan Induk Koperasi Perikanan Indonesia untuk turut membantu pengembangan ekonomi nelayan. Dengan keberadaan IKPI ini, nelayan diharapkan mampu untuk memperbaiki keadaan ekonominya dengan mendapatkan modal ataupun peralatan dari IKPI. Semangat nasionalisasi dan anti asing yang masih membara hingga tahun 1966 mendorong berbagai lapisan masyarakat untuk bisa bangkit dari perekonomian yang masih dikuasai oleh asing terutama oleh masyarakat Cina. Pemasaran ikan asin hingga tahun 1966 sendiri masih dikuasai oleh kelompok dagang Perapian yang dulu dimiliki oleh Hoo Goan. Organisasi pusat pedagang ikan asin tersebut terdiri dari 32 pengusaha asing, dan 70,5 % diantaranya berasal dari RRT.<sup>27</sup> Oleh karena itu, pembentukan IKPI tersebut merupakan sebuah langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengambil alih peranan yang didominasi oleh asing.

---

<sup>23</sup> Arsip Angkatan Laut, No. 4. Tahun 1966.

<sup>24</sup> Arsip Roeslan Abdulgani, No. 26. Tahun 1966.

<sup>25</sup> Arsip Angkatan Laut No. 108. Tahun 1965..

<sup>26</sup> *op. cit.*, n.d.

<sup>27</sup> ANRI, "Inventaris Ekuin No. 2827. Tahun 1966."

Ada sebuah keterkaitan antara pembentukan koperasi nelayan dengan Brignel ini. Keterlibatan masyarakat nelayan dalam organisasi Brignel ini kemudian memunculkan peranan baru para nelayan dalam menertibkan perdagangan maupun pelayaran. Salah satu peranan Brignel yang paling signifikan di Pangandaran adalah untuk mengarahkan para nelayan agar menjual hasil tangkapan ikan mereka kepada koperasi-koperasi pemerintah. Keberadaan Brignel sebagai penertib nelayan inipun sebenarnya menjadi sebuah dilema masyarakat. Harga jual ikan para nelayan yang dijual ke koperasi ini memang harganya lebih murah, sehingga banyak para nelayan yang secara diam-diam menjual hasil tangkapannya kepada para turis maupun langsung kepada konsumen. Namun disisi lain, meskipun koperasi memiliki harga beli yang relatif murah, para nelayan bisa mendapatkan beberapa jaminan seperti jaminan uang kecelakaan, kematian, tabungan dan lain-lain.<sup>28</sup>

## SIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan kepemilikan lautnya. Sebagai negara yang memiliki panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia seharusnya Indonesia mampu mengutamakan sektor laut dalam memecahkan masalah ekonomi. Dengan adanya potensi tersebut, Indonesia berpeluang besar menjadi negara yang bisa memenuhi komoditas yang bersumber pada laut untuk dunia. Namun pada kenyataannya saat ini, masih banyak wilayah-wilayah pantai yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Masyarakat Indonesia masih saja fokus terhadap bidang agraris dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Jika ditinjau dalam sudut pandang sejarah, masyarakat di berbagai daerah pantai sudah memanfaatkan potensi laut di Indonesia sejak dulu, khususnya daerah pantai selatan. Sebagai salah satu contohnya adalah kabupaten Pangandaran. Keberanian para nelayan di Pangandaran untuk melawan ombak dengan menggunakan alat tradisional seperti pada tahun 1950an merupakan sebuah contoh bahwa nenek moyang kita memang benar-benar seorang pelaut. Meskipun terletak di pesisir selatan, para nelayan Pangandaran tidak pernah takut untuk melawan besarnya ombak. Oleh karena itu hingga saat ini Pangandaran menjadi salah satu daerah unggulan dalam sektor perikanan maupun pariwisata alam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahid, Idat, Mien Rukmini, dan Muhammad Fanani. *Kodifikasi Cerita Rakyat daerah Wisata Pangandaran, Jawa Barat*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- Adriati, Ira. *Perahu Sunda: Kajian Hiasan pada Perahu Nelayan di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa*. Bandung: Kiblat Buku Utama, 2004.
- ANRI. Inventaris Ekuin No. 2827. Tahun 1966. (n.d.).
- Arsip Angkatan Laut, No. 4. Tahun 1966 (n.d.).
- Arsip Angkatan Laut No. 108. Tahun 1965. (n.d.).

---

<sup>28</sup> *op. cit.*, n.d.

Arsip Roeslan Abdulgani, No. 26. Tahun 1966 (n.d.).

Lapian, Adrian B. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.

Masyuri. *Menyisir Pantai Utara Jawa: Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940*. Jakarta: Yayasan Pustaka Utama, 1995.

Mulyono, Fransisca. "Pengaruh Kebijakan Inkremental terhadap Pengembangan Kepariwisata di Pangandaran." Universitas Indonesia, 1994.

Thomson, Paul. *Suara dari Masa Silam*. Yogyakarta: Ombak, 2012.

Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2012.

Wawancara dengan Bapak Enas, 84 tahun, di Pangandaran, 9 April 2017.

Wawancara dengan Ibu Atik Sarti, 44 tahun, pada tanggal 10 April 2017, di Pangandaran.

Wawancara dengan Ibu Saminah, 70 tahun, di Pangandaran, 10 April 2017.

Wawancara dengan Usup Darso, 73 Tahun, Nelayan dan Pedagang, 9 April 2017.